

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 1996 di Indonesia mengalami krisis ekonomi dan tahun 1997 merupakan puncak dari krisis ekonomi tersebut. Hal ini yang membuat pemerintah Indonesia menjadi sadar akan pentingnya akuntansi dalam pemerintahan yaitu dengan mendorong pendelegasian sebagian wewenang pemerintah pusat untuk pengelolaan keuangan kepada daerah, agar daerah mampu untuk membiayai pembangunan dan pelayanan atas dasar keuangan sendiri. Selain hal tersebut, pemerintah daerah ingin memberikan pelayanan yang lebih berorientasi pada kepuasan masyarakat serta kebutuhan dan keinginan rakyat mengenai kinerja pemerintah daerah semakin besar dan kritis, terutama semenjak era-reformasi yang melahirkan ketetapan MPR yaitu TAP MPR nomor XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Republik Indonesia.

TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 merupakan landasan hukum dikeluarkannya UU No.22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, kemudian direvisi sebanyak dua kali yaitu tahun 2004 (UU No.32 tahun 2004) dan tahun 2014 (UU No.23 tahun 2014) yang menegaskan bahwa kewenangan Pemda untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan asas otonomi dan tugas

pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dampak tersebut, peran Pemda dalam penyediaan layanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan nasional menjadi semakin besar dan dibutuhkan adanya sistem pengendalian, evaluasi dan pengukuran kinerja yang sistematis untuk mengukur kemajuan yang dicapai Pemda. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu menyelenggarakan pemerintahannya agar tercipta tata kelola pemerintahan daerah yang baik.

Dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahannya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2007, Pemerintah daerah wajib mempertanggung jawabkan dalam bentuk Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). LPPD merupakan suatu bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pertanggungjawaban kinerja tata kelola pemerintahan daerah terhadap masyarakat. Dalam LPPD sendiri mencakup informasi yang berasal dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang dilaksanakan oleh suatu Pemerintah Daerah. Dengan demikian, isi dari LPPD Pemerintah daerah kabupaten sangat tergantung dengan urusan yang menjadi tanggung jawabnya dan karakteristik dari masing-masing Pemda tersebut (Mustikarini dan Fitriyasi, 2012).

Pada pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilaporkan dalam LPPD sangat diperlukan adanya sebuah evaluasi. Evaluasi yang dimaksud adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD). EKPPD ini merupakan suatu proses evaluasi atau penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, penyelenggaraan otonomi daerah, dan aspek-aspek penyelenggaraan pemerintah daerah yang semuanya telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 73 Tahun 2009. EKPPD tersebut menggunakan LPPD sebagai sumber informasi utama dalam melakukan suatu evaluasi. Disamping itu juga ada beberapa sumber informasi pelengkap antara lain Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, informasi keuangan daerah dan laporan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang berasal dari lembaga independen. Hasil dari EKPPD tersebut berupa Laporan Hasil Evaluasi Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan digunakan Pemerintah sebagai dasar untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan kebijakan Pemerintah dalam penyelenggaraan otonomi atau pembentukan, penghapusan/penggabungan daerah otonom.

Salah satu informasi pelengkap EKPPD yaitu informasi keuangan daerah. Berhasil atau tidaknya suatu pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya dapat dilihat dari laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah yang juga dapat dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban terhadap publik. Namun demikian, apabila terjadi hal-hal yang terdapat penyimpangan dalam laporan keuangan maka terdapat indikasi temuan audit BPK sehingga temuan tersebut dapat

dijadikan suatu alasan kenapa pemerintah daerah tersebut tidak menjalankan kinerja dengan dengan baik.

Dalam keuangan daerah terdapat informasi yang mencerminkan karakteristik daerah yang dapat mempengaruhi kinerja pemerintahan, antara lain ukuran daerah yang dilihat dari total aset tingkat kekayaan daerah yang dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat berupa Dana Alokasi Umum (DAU) dan jumlah belanja modal. Penelitian mengenai karakteristik pemerintah daerah pernah diteliti oleh Mustikarini dan Fitriyani (2012), semakin tinggi karakteristik suatu daerah (tingkat kekayaan daerah, tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat dan jumlah belanja modal) maka semakin baik pula kinerja penyelenggaraan suatu pemerintah daerah.

Hal terakhir yang dapat memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah adalah pemeriksaan (audit). Masalah pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam penyusunan LPPD suatu Pemerintah daerah sehingga perlu dilakukan pengawasan dan pemeriksaan (audit) yang baik agar tidak terjadi kecurangan (*fraud*). Undang-Undang No. 15 tahun 2004 (UU No. 15/2004) tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan bahwa Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan keuangan negara dilakukan oleh Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK) dan terdiri dari pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Hasil dari pemeriksaan yang dilakukan BPK tersebut berupa opini, temuan, kesimpulan atau dalam bentuk rekomendasi. Penelitian sebelumnya mengenai temuan audit BPK diteliti oleh Sedyaningsih dan Zaky (2015), semakin sedikit jumlah temuan audit dari BPK maka semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, maka penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK memiliki terhadap kinerja pemerintah daerah yang diukur dengan nilai EKPPD pada kabupaten/kota di Jawa Timur.

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang diuji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kekayaan daerah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten?
2. Apakah tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten?
3. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten?
4. Apakah temuan audit berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten.
2. Untuk mengetahui tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten?
3. Untuk mengetahui pengaruh belanja modal terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten.
4. Untuk mengetahui pengaruh temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah kabupaten.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat akademik
Diharapkan dapat lebih memahami pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan temuan audit BPK terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, serta memberikan tambahan wacana penelitian bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktik
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan

penyediaan data capaian kinerja pada tataran pengambil kebijakan daerah dan tataran pelaksana kebijakan daerah yang dimuat dalam LPPD, LKPJ, ILPPD dan laporan lainnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini berisikan penelitian terdahulu, landasan teori, pengembangan hipotesis, dan model penelitian.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam Bab ini berisikan desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional, indikator, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, teknik analisis data.

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini berisikan karakteristik objek penelitian, deskripsi data, analisis data dan pengujian hipotesis serta pembahasan.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Dalam Bab ini berisikan tentang simpulan, keterbatasan dan saran.